

"The Plantation Keeps Growing, So Does Our Burden": A Gender Analysis of Double Burden, Power Relations, and Unequal Access among Women Palm Oil Workers in the Transformation of Palm Oil Plantations

Akhyar Rafi'i^{1,*}, Erfina Aisyah¹ dan Nurul Azkia²

¹) D4 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, Politeknik Murakata

²) Teknologi Produksi Pakan Ternak, Politeknik Negeri Tanah Laut

*) Corresponding author: akhyarrafiid@gmail.com

Abstrak

Transformasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama ini lebih banyak diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan, sementara dimensi keadilan gender dalam sistem ketenagakerjaan masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis beban ganda, relasi kuasa, dan ketimpangan akses yang dialami buruh sawit perempuan dalam konteks transformasi perkebunan kelapa sawit. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi fenomenologi dan etnografi sosial. Penelitian dilaksanakan pada sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan identitas perusahaan disamarkan sebagai bentuk perlindungan etika penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap 20 buruh harian lepas perempuan, tiga mandor, satu staf sumber daya manusia, dua tokoh desa, serta sepuluh suami buruh perempuan sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh sawit perempuan bekerja selama delapan hingga sembilan jam per hari, namun tetap memikul tanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik sehingga mengalami beban ganda yang berkelanjutan. Pembagian kerja berbasis gender menempatkan perempuan pada jenis pekerjaan dengan peluang pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun memiliki kemampuan kerja yang setara. Selain itu, perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap pelatihan, promosi jabatan, alat pelindung diri, serta ruang pengambilan keputusan sehingga suara mereka cenderung tidak terakomodasi dalam sistem kerja. Kontribusi ekonomi perempuan terhadap keberlangsungan rumah tangga juga belum diikuti dengan pengakuan atas kerja dan pengalaman mereka, bahkan kelompok janda masih menghadapi kerentanan terhadap diskriminasi dan seksisme di lingkungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan tidak dapat hanya berorientasi pada aspek produksi dan lingkungan, tetapi juga harus mencakup transformasi relasi gender melalui penguatan keadilan kerja, kesetaraan akses, dan pengakuan terhadap kontribusi buruh perempuan.

Kata kunci: Buruh sawit perempuan; Beban ganda; Relasi kuasa; Ketimpangan akses; Transformasi perkebunan

Abstract

The transformation of Indonesia's palm oil plantations has predominantly emphasized productivity, technological advancement, and environmental sustainability, while the social dimensions of gender justice remain largely overlooked. This study aims to analyze the double burden, power relations, and unequal access experienced by women palm oil workers within the broader discourse of plantation transformation. An exploratory qualitative design was employed using phenomenological and social ethnographic approaches. The research was conducted in a privately owned palm oil plantation in Cintapuri Village, Cintapuri Darussalam District, Banjar Regency, South Kalimantan. To protect research ethics and institutional confidentiality, the company's identity is withheld. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving 20 women casual daily workers, three field supervisors, one human resource officer, two village leaders, and ten spouses as supporting informants. The findings reveal that women work approximately eight to nine hours daily while simultaneously carrying full responsibility for domestic and community roles, creating a persistent double burden. Gender-based labor

segmentation confines women to nursery, maintenance, fertilization, and land-clearing tasks with limited earning opportunities, whereas higher-paid harvesting and planting activities remain predominantly assigned to men despite comparable capacities. Women also experience restricted access to occupational training, promotion opportunities, personal protective equipment, and decision-making processes, rendering them largely voiceless within the plantation system. Their substantial contribution to household livelihoods receives little recognition, while widowed workers face heightened discrimination and sexist treatment. Furthermore, indications of underage female labor driven by economic hardship expose additional structural vulnerabilities. This study concludes that meaningful plantation transformation cannot be achieved solely through improvements in production and environmental performance; it must also incorporate gender transformation by ensuring equitable labor relations, equal access, and social justice as integral components of sustainable plantation development.

Keywords: Gender equality; Women palm oil workers; Double burden; Power relations; Sustainable plantation

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di sepanjang rantai produksinya. Dalam perkembangannya, industri ini terus mengalami transformasi yang diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, hilirisasi, tata kelola, serta pemenuhan prinsip keberlanjutan (Widyaningsih et al., 2025). Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga dengan tuntutan terhadap tata kelola perkebunan yang semakin memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah tersebut semakin jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang menempatkan kelayakan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Transformasi tersebut pada dasarnya menempatkan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan industri sawit. Namun, pembicaraan mengenai transformasi perkebunan sering kali lebih menonjolkan perubahan pada aspek teknis dan produksi, sementara pekerja sebagai aktor utama dalam proses produksi belum selalu ditempatkan sebagai subjek transformasi (Pierce Colfer et al., n.d.). Padahal, kegiatan perkebunan kelapa sawit secara langsung melibatkan tenaga kerja dalam berbagai tahapan pengelolaan sumber daya, pemeliharaan tanaman, pemanenan, hingga proses produksi lainnya. Dengan demikian, perubahan pada sistem produksi seharusnya berjalan beriringan dengan perubahan pada kondisi kerja, kapasitas, perlindungan, dan posisi sosial-ekonomi pekerja.

Persoalan tersebut menjadi penting karena transformasi industri tidak secara otomatis menghasilkan kondisi kerja yang lebih adil. International Labour Organization

(ILO) mencatat bahwa sektor kelapa sawit Indonesia masih menghadapi berbagai defisit pekerjaan layak, antara lain keterbatasan akses terhadap hak-hak fundamental pekerja, tingkat upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, serta persoalan keselamatan dan kesehatan kerja. ILO memperkirakan sektor kelapa sawit melibatkan sekitar 17 juta pekerja secara langsung dan karena itu persoalan ketenagakerjaan di sektor ini memiliki implikasi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Upaya memperkuat perlindungan pekerja juga masih berlangsung melalui penguatan kapasitas perusahaan, pekerja, serikat pekerja, serta mekanisme dialog sosial di sektor kelapa sawit.

Dimensi ketenagakerjaan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dilihat melalui perspektif gender. Perempuan merupakan bagian penting dari tenaga kerja perkebunan, tetapi posisi mereka dalam sistem kerja sering kali tidak setara dengan laki-laki. ILO menempatkan perempuan sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kondisi kerja yang buruk di sektor kelapa sawit (Eliza et al., 2023). Perempuan masih menghadapi persoalan diskriminasi dalam upah, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja, sementara pada saat yang sama mereka tetap menanggung proporsi pekerjaan perawatan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman perempuan sebagai pekerja tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas produksi, tetapi perlu dilihat melalui hubungan antara pekerjaan berbayar, pekerjaan domestik, akses terhadap sumber daya, dan struktur kekuasaan yang bekerja di tempat kerja maupun rumah tangga.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam sistem perkebunan kelapa sawit memiliki dimensi gender yang kuat. Studi mengenai penggunaan waktu dan relasi gender dalam komunitas kelapa sawit di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa laki-laki memiliki akses terhadap jenis pekerjaan yang lebih beragam, termasuk pekerjaan dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, sedangkan perempuan lebih banyak menanggung pekerjaan domestik dan pekerjaan pertanian lainnya (Mardiharini et al., 2021). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian kerja berdasarkan gender dapat memengaruhi akses perempuan terhadap pendapatan dan kesempatan ekonomi. Penelitian lain mengenai budidaya kelapa sawit dan relasi gender dalam rumah tangga di Indonesia juga menemukan bahwa perubahan dalam sistem produksi tidak selalu meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan; waktu yang tersedia bagi perempuan justru dapat kembali dialokasikan pada pekerjaan rumah tangga dan perawatan, sehingga keterlibatan mereka dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan tetap terbatas.

Dengan demikian, persoalan perempuan dalam perkebunan kelapa sawit tidak cukup dipahami sebagai persoalan keterwakilan tenaga kerja. Yang lebih mendasar adalah bagaimana struktur kerja menentukan jenis pekerjaan yang dapat diakses perempuan, bagaimana pekerjaan tersebut dihargai secara ekonomi, serta sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ketika perempuan ditempatkan pada pekerjaan tertentu berdasarkan konstruksi gender, sementara pekerjaan dengan peluang pendapatan, mobilitas, atau akses yang lebih besar lebih banyak tersedia bagi laki-laki, maka transformasi produksi dapat berlangsung bersamaan dengan reproduksi ketimpangan gender.

Persoalan akses juga menjadi perhatian dalam agenda ketenagakerjaan sektor kelapa sawit. Program penguatan hak pekerja di Indonesia secara khusus menyoroti pekerja perempuan karena meskipun mereka integral dalam kegiatan perkebunan, perempuan masih kurang terwakili dalam organisasi pekerja dan proses pengambilan keputusan (Azahari et al., 2024). Pada Desember 2025, ILO bersama mitra sektor kelapa sawit bahkan mendorong pengembangan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja yang responsif gender. Inisiatif tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menghadapi risiko kerja yang berbeda karena perbedaan jenis pekerjaan, pola ketenagakerjaan, serta kebutuhan yang berkaitan dengan gender. Pada saat yang sama, perempuan masih kerap diposisikan sebagai pekerja sekunder atau tersier dan menghadapi kerentanan terhadap pelecehan di tempat kerja.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara agenda transformasi industri dan pengalaman pekerja pada tingkat perkebunan. Transformasi yang berorientasi pada produktivitas, teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan belum tentu diikuti oleh transformasi relasi kerja yang memungkinkan seluruh pekerja memperoleh manfaat secara setara. Dalam konteks perempuan, kesenjangan tersebut dapat muncul dalam bentuk beban kerja yang berlapis, pembagian kerja berdasarkan gender, perbedaan kesempatan memperoleh pendapatan, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan perlindungan kerja, serta terbatasnya ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Fatchiya et al., 2022). Oleh karena itu, keberlanjutan industri kelapa sawit seharusnya tidak hanya diukur melalui capaian produksi dan pemenuhan standar lingkungan, tetapi juga melalui kemampuan sistem perkebunan menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, dan setara.

Meskipun perhatian terhadap gender dalam sektor kelapa sawit semakin berkembang, kajian mengenai perempuan masih banyak ditempatkan pada konteks rumah

tangga petani, pembagian kerja, atau pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, pengalaman perempuan yang bekerja sebagai buruh perkebunan, khususnya pekerja dengan hubungan kerja harian, masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama dalam melihat keterkaitan antara beban kerja, relasi kuasa, dan akses terhadap sumber daya di tempat kerja. Kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan ketika industri kelapa sawit sedang didorong untuk melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa buruh merupakan subjek utama dalam proses transformasi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, transformasi industri seharusnya tidak berhenti pada perubahan teknis dan produktif, tetapi juga mencakup perubahan kondisi sosial dan ketenagakerjaan yang memungkinkan pekerja memperoleh akses dan manfaat secara lebih setara. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis pengalaman buruh perempuan dalam sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penelitian ini secara khusus menganalisis tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu **beban ganda, relasi kuasa, dan ketimpangan akses** yang dialami buruh perempuan dalam sistem kerja perkebunan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana beban ganda, relasi kuasa, dan ketimpangan akses dialami oleh buruh perempuan dalam konteks transformasi perkebunan kelapa sawit. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai transformasi industri sawit dengan menempatkan pengalaman pekerja perempuan sebagai bagian integral dari agenda keberlanjutan. Dengan demikian, transformasi perkebunan tidak hanya dipahami sebagai perubahan pada sistem produksi, tetapi juga sebagai proses yang semestinya membawa perubahan pada relasi kerja, kesempatan ekonomi, perlindungan, dan kesetaraan bagi pekerja yang menopang keberlangsungan industri tersebut.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan relasi sosial yang dialami buruh perempuan dalam sistem kerja perkebunan kelapa sawit (Hikmawati, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur besaran ketimpangan secara statistik, melainkan untuk mengeksplorasi bagaimana beban kerja, relasi kuasa, dan akses terhadap

sumber daya dialami serta dimaknai oleh perempuan dalam kehidupan kerja dan rumah tangga.

Desain penelitian memadukan perspektif fenomenologi dan etnografi sosial. Perspektif fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup buruh perempuan, khususnya pengalaman menjalankan pekerjaan produktif dan domestik, menghadapi pembagian kerja berbasis gender, serta berinteraksi dengan struktur kerja di perkebunan (Ahyar et al., 2020). Sementara itu, perspektif etnografi sosial digunakan untuk memahami praktik, kebiasaan, pola interaksi, dan relasi sosial yang membentuk pengalaman tersebut dalam konteks komunitas dan lingkungan kerja. Penggunaan kedua perspektif tersebut memungkinkan penelitian melihat pengalaman perempuan tidak hanya sebagai pengalaman individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial dan relasi kuasa yang lebih luas.

Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang berlokasi di Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu dari Desember 2025 hingga Mei 2026.

Identitas perusahaan tidak dicantumkan dalam penelitian dan selanjutnya disebut sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penyamaran identitas dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan etika penelitian, mengingat penelitian membahas persoalan ketenagakerjaan yang bersifat kritis, termasuk relasi kuasa, ketimpangan akses, perlindungan kerja, dan pengalaman diskriminasi yang dialami pekerja perempuan.

Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap aktivitas kerja perkebunan serta pengalaman buruh perempuan. Informan utama terdiri atas 20 buruh harian lepas perempuan yang bekerja pada perusahaan perkebunan yang sama. Kelompok ini menjadi sumber utama untuk menggali pengalaman mengenai beban kerja, pembagian pekerjaan, akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja, serta relasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam lingkungan perkebunan.

Untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam dan melakukan triangulasi informasi, penelitian juga melibatkan informan pendukung yang terdiri atas tiga orang mandor, satu orang staf sumber daya manusia, dua orang tokoh desa, dan sepuluh orang

suami buruh perempuan. Dengan demikian, keseluruhan informan penelitian berjumlah 36 orang.

Keterlibatan informan dari beberapa posisi tersebut memungkinkan penelitian membandingkan pengalaman perempuan sebagai pekerja dengan perspektif pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja, serta perspektif keluarga dan lingkungan sosial buruh perempuan. Komposisi informan juga digunakan untuk memahami bagaimana pembagian kerja, pengambilan keputusan, dan akses terhadap sumber daya diproduksi tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga berkaitan dengan relasi dalam rumah tangga dan komunitas.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Murdiyanto, 2020). Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman kerja, pembagian pekerjaan, jam kerja, pendapatan, akses terhadap pelatihan dan perlindungan kerja, hubungan dengan atasan, serta pengalaman perempuan dalam menjalankan tanggung jawab domestik dan produktif secara bersamaan. Wawancara juga dilakukan terhadap mandor, staf sumber daya manusia, tokoh desa, dan suami buruh perempuan untuk memperoleh perspektif pembanding terhadap pengalaman yang disampaikan oleh informan utama.

Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati aktivitas kerja dan interaksi sosial yang berlangsung dalam konteks perkebunan. Pengamatan diarahkan pada pembagian pekerjaan berdasarkan gender, pola interaksi antara buruh dan pihak pengawas, penggunaan perlengkapan kerja, serta praktik kerja yang berkaitan dengan posisi dan akses perempuan. Observasi juga membantu memahami konteks sosial yang tidak selalu dapat dijelaskan secara utuh melalui wawancara.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi mencakup berbagai informasi dan catatan yang relevan dengan aktivitas penelitian serta kondisi kerja buruh perempuan. Penggunaan tiga teknik pengumpulan data dilakukan secara saling melengkapi agar informasi yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber data.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan makna dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan tema-

tema yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian dibandingkan antar-informan dan antar-sumber data (Miles & Huberman, 2014).

Analisis diarahkan pada tiga tema utama, yaitu **(1) beban ganda perempuan, (2) relasi kuasa dalam sistem kerja, dan (3) ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja**. Ketiga tema tersebut dianalisis secara interrelasional untuk melihat bagaimana struktur pembagian kerja dan relasi kuasa dapat menghasilkan atau mempertahankan ketimpangan yang dialami buruh perempuan.

Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan pengalaman empiris informan dengan perspektif gender dan relasi kuasa. Dengan cara tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk ketimpangan yang dialami perempuan, tetapi juga menjelaskan bagaimana ketimpangan tersebut terbentuk dan dipertahankan dalam sistem kerja perkebunan serta bagaimana kondisi tersebut berkaitan dengan agenda transformasi perkebunan kelapa sawit.

Keabsahan Data dan Etika Penelitian

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari buruh perempuan dengan keterangan mandor, staf sumber daya manusia, tokoh desa, dan suami buruh Perempuan (Miles & Huberman, 2014). Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumentasi.

Aspek etika penelitian diperhatikan melalui perlindungan identitas perusahaan dan informan. Nama perusahaan disamarkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi mengenai persoalan ketenagakerjaan yang bersifat sensitif (Miles & Huberman, 2014). Identitas personal informan juga tidak digunakan dalam penyajian hasil penelitian. Data dan pengalaman informan digunakan untuk kepentingan analisis akademik dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan keamanan pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Ganda Buruh Perempuan: Ketika Kerja Produktif Berlanjut ke Rumah Tangga

Beban ganda menjadi salah satu temuan utama dalam pengalaman buruh perempuan di lokasi penelitian. Para perempuan bekerja sebagai buruh harian lepas selama kurang lebih delapan hingga sembilan jam dalam sehari, tetapi berakhirnya jam kerja di

perkebunan tidak berarti berakhir pula tanggung jawab mereka. Setelah kembali ke rumah, mereka kembali memasuki ruang kerja domestik yang hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan (Rosihan Khalik & Yossi Permata, 2024). Pekerjaan tersebut meliputi membersihkan rumah, memasak, mengurus kebutuhan keluarga, serta berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Dengan demikian, waktu perempuan terbagi antara kerja produktif yang menghasilkan pendapatan dan kerja reproduktif yang menopang keberlangsungan rumah tangga tetapi tidak memperoleh imbalan ekonomi secara langsung.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja domestik dalam rumah tangga buruh perempuan masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi patriarki. Hampir seluruh informan perempuan yang telah menikah menggambarkan bahwa pekerjaan domestik pada dasarnya merupakan tanggung jawab mereka. Suami tidak secara berarti mengambil alih pekerjaan rumah tangga setelah perempuan menyelesaikan pekerjaan di perkebunan. Kondisi tersebut terjadi meskipun sebagian suami juga bekerja, baik sebagai buruh maupun pada sektor pekerjaan lainnya. Dalam pandangan yang ditemukan di lapangan, ketika laki-laki telah bekerja dan memperoleh penghasilan, kewajibannya sebagai pasangan dianggap telah dipenuhi, sementara pekerjaan domestik tetap dilekatkan pada perempuan.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan produktif dan reproduktif tidak memiliki nilai sosial yang sama dalam pembagian peran rumah tangga. Ketika perempuan bekerja di perkebunan, kontribusi ekonominya diperlakukan sebagai tambahan terhadap tanggung jawab domestik, bukan sebagai alasan untuk mendistribusikan kembali pekerjaan rumah tangga secara lebih setara. Sebaliknya, pekerjaan laki-laki yang menghasilkan pendapatan lebih mudah dipahami sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan mengalami apa yang dapat disebut sebagai *double burden*, yaitu keterlibatan simultan dalam pekerjaan berbayar dan pekerjaan reproduktif yang tetap harus diselesaikan setelah jam kerja formal berakhir (. et al., 2026).

Beban tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian perempuan memasuki pekerjaan perkebunan bukan semata-mata karena pilihan ekonomi yang bebas, tetapi karena kebutuhan rumah tangga. Status sebagai buruh harian lepas juga membuat pendapatan mereka tidak selalu pasti. Tidak adanya kepastian bahwa mereka akan memperoleh pekerjaan setiap hari berarti terdapat kemungkinan pada hari tertentu mereka tidak bekerja dan tidak memperoleh pendapatan. Sistem pembayaran mingguan juga membuat pendapatan yang diterima perempuan sangat bergantung pada jumlah hari kerja yang tersedia. Dalam kondisi ketika kontribusi ekonomi suami tidak selalu mencukupi atau

ketika suami tidak bersedia mengambil pekerjaan sebagai buruh, perempuan pada akhirnya menjadi salah satu pihak yang harus masuk ke pasar kerja untuk menopang kebutuhan keluarga.

Situasi tersebut menunjukkan paradoks dalam posisi buruh perempuan. Di satu sisi, kontribusi mereka diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, kontribusi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan redistribusi tanggung jawab domestik maupun peningkatan posisi tawar perempuan di dalam rumah tangga. Perempuan tetap diharapkan memenuhi pekerjaan domestik sebagaimana sebelum mereka memasuki pekerjaan berbayar. Dengan kata lain, masuknya perempuan ke dalam aktivitas ekonomi tidak serta-merta mengubah struktur pembagian kerja berbasis gender yang telah berlangsung di dalam rumah tangga.

Perbedaan pengalaman antara buruh perempuan yang telah menikah dan janda juga memperlihatkan dimensi lain dari beban ganda. Perempuan yang menikah menghadapi lapisan tanggung jawab yang lebih kompleks karena selain menjalankan pekerjaan produktif dan pekerjaan domestik, mereka juga menghadapi ekspektasi yang melekat pada peran sebagai istri. Beban tersebut mencakup tanggung jawab terhadap kebutuhan pasangan, pengelolaan rumah tangga, serta tuntutan reproduktif dan emosional dalam relasi perkawinan. Sementara itu, perempuan yang berstatus janda tidak menghadapi tuntutan relasional yang sama dari pasangan, tetapi harus menanggung tanggung jawab ekonomi dan domestik rumah tangga secara lebih individual. Dengan demikian, status perkawinan menghasilkan konfigurasi beban yang berbeda meskipun keduanya sama-sama menghadapi tuntutan pekerjaan produktif dan domestik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa beban ganda buruh perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan banyaknya pekerjaan yang dilakukan dalam satu hari. Beban tersebut merupakan hasil dari pembagian kerja yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap reproduksi rumah tangga, sementara keterlibatan mereka dalam pekerjaan berbayar tidak secara otomatis mengubah pembagian tanggung jawab tersebut. Dalam konteks buruh harian lepas, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena perempuan juga menghadapi ketidakpastian pendapatan dan keberlangsungan kerja.

Dari perspektif transformasi perkebunan, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pada sistem produksi belum sepenuhnya diikuti perubahan pada kondisi sosial pekerjaannya (Rosihan Khalik & Yossi Permata, 2024). Perempuan telah menjadi bagian penting dari tenaga kerja produktif perkebunan, tetapi struktur sosial di luar tempat kerja

masih menempatkan mereka dalam posisi sebagai penanggung jawab utama pekerjaan reproduktif. Dengan demikian, transformasi yang meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi belum tentu menghasilkan transformasi relasi gender apabila pembagian kerja domestik dan ekspektasi sosial terhadap perempuan tetap tidak berubah.

Beban ganda akhirnya menjadi titik awal untuk memahami persoalan yang lebih luas dalam pengalaman buruh perempuan. Ketika waktu dan energi perempuan terbagi antara pekerjaan produktif dan reproduktif, sementara status kerja mereka sendiri tidak memberikan kepastian ekonomi yang kuat, kemampuan untuk mengakses kesempatan lain seperti pelatihan, pengembangan kapasitas, mobilitas pekerjaan, maupun ruang pengambilan keputusan juga berpotensi menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, beban ganda bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa dan ketimpangan akses yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Relasi Kuasa dan Pembagian Kerja Berbasis Gender

Relasi kuasa dalam sistem kerja perkebunan terlihat dari bagaimana pembagian pekerjaan dibentuk berdasarkan konstruksi gender. Buruh perempuan dalam penelitian ini lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan perawatan tanaman, terutama di wilayah pembibitan (Widyaningsih et al., 2025). Pekerjaan tersebut meliputi pengisian tanah ke dalam polybag, pembersihan gulma, penyiangan, seleksi bibit, dan penyiraman pada pembibitan yang masih membutuhkan tenaga manual. Penempatan perempuan pada pekerjaan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa pekerjaan di pembibitan dan perawatan tanaman relatif lebih ringan dan sesuai bagi perempuan.

Sebaliknya, pekerja laki-laki memiliki cakupan pekerjaan yang lebih luas. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam pembuatan lubang tanam, penanaman, pemanenan, serta pekerjaan pengendalian hama dan penyakit dengan tingkat beban kerja yang lebih berat. Pekerjaan pemanenan secara khusus sepenuhnya didominasi oleh laki-laki dalam konteks penelitian ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya segregasi pekerjaan berdasarkan gender, ketika jenis pekerjaan tertentu secara sosial dan organisatoris lebih dekat dengan identitas laki-laki, sementara pekerjaan lain dilekatkan pada perempuan.

Pembagian tersebut menjadi penting karena tidak semua jenis pekerjaan memiliki nilai ekonomi dan peluang pendapatan yang sama. Pekerjaan tertentu, terutama yang menggunakan sistem borongan, memungkinkan pekerja memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Dengan demikian, akses terhadap jenis

pekerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan peluang ekonomi pekerja. Perempuan pada dasarnya dapat mengerjakan pekerjaan yang selama ini didominasi laki-laki apabila secara fisik dan teknis mampu melakukannya. Beberapa informan perempuan bahkan pernah mengerjakan pekerjaan seperti pembuatan lubang tanam yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Namun, keterlibatan tersebut belum menjadi pola umum dalam sistem kerja perkebunan.

Dalam pekerjaan yang menggunakan sistem borongan, tidak terdapat perbedaan tarif berdasarkan jenis kelamin. Persoalannya terletak pada perbedaan produktivitas yang dipersepsikan maupun yang terjadi dalam praktik. Pekerja laki-laki dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat karena lebih terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Akibatnya, meskipun tarif pekerjaan yang diterima perempuan dan laki-laki dapat sama, jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam waktu tertentu berbeda. Ketimpangan pendapatan dengan demikian tidak selalu muncul dalam bentuk perbedaan nominal upah untuk satu jenis pekerjaan, tetapi dapat muncul melalui **ketimpangan akses terhadap pekerjaan dan perbedaan kesempatan menghasilkan pendapatan.**

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa gender bekerja melalui mekanisme yang lebih halus daripada sekadar diskriminasi upah secara langsung. Ketika perempuan lebih banyak diarahkan pada pekerjaan perawatan dengan karakteristik tertentu, sementara pekerjaan dengan peluang pendapatan lebih besar didominasi laki-laki, struktur pembagian kerja tersebut secara tidak langsung memengaruhi posisi ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai kesetaraan tidak cukup dijawab dengan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh tarif upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kesetaraan juga perlu dilihat dari **siapa yang memperoleh akses terhadap pekerjaan dengan nilai ekonomi lebih tinggi dan siapa yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pada pekerjaan tersebut.**

Penempatan perempuan pada pekerjaan tertentu juga memperlihatkan adanya proses pengambilan keputusan yang bersifat hierarkis. Mandor memiliki kewenangan dalam menentukan pembagian pekerjaan buruh (Eliza et al., 2023). Dalam praktiknya, buruh perempuan tidak memiliki ruang yang luas untuk memilih jenis pekerjaan yang ingin mereka lakukan. Hubungan antara buruh dan mandor secara umum berlangsung baik, tetapi hubungan yang baik tersebut tidak berarti terdapat relasi yang setara. Buruh datang untuk bekerja berdasarkan pekerjaan yang tersedia dan menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh mandor. Posisi buruh sebagai pekerja harian lepas semakin memperkuat

ketergantungan tersebut karena keberlangsungan pekerjaan mereka berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan dan keputusan pihak yang memiliki kewenangan di lapangan.

Keterbatasan ruang negosiasi tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak selalu ditampilkan melalui konflik terbuka. Kekuasaan dapat bekerja melalui mekanisme sehari-hari, seperti penentuan lokasi kerja, jenis pekerjaan, dan siapa yang dianggap sesuai untuk mengerjakannya. Ketika perempuan sejak awal dipersepsikan lebih sesuai untuk pekerjaan pembibitan dan perawatan, pilihan pekerjaan mereka secara praktis telah dibatasi oleh konstruksi mengenai kemampuan dan produktivitas berdasarkan gender. Perempuan tetap dapat memasuki pekerjaan yang didominasi laki-laki, tetapi harus menunjukkan kemampuan dan produktivitas yang dianggap setara untuk memperoleh ruang tersebut.

Persepsi mengenai produktivitas menjadi salah satu alasan penting dalam mempertahankan pembagian kerja tersebut. Pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan kecepatan cenderung dilekatkan pada laki-laki karena laki-laki dianggap lebih produktif. Sebaliknya, perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan yang dianggap lebih ringan dan membutuhkan ketelitian. Konstruksi tersebut pada akhirnya menciptakan lingkaran yang sulit diputus: perempuan lebih jarang memperoleh kesempatan melakukan pekerjaan tertentu karena dianggap kurang produktif, sementara keterbatasan kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut juga membuat pengalaman dan keterampilan mereka pada bidang tersebut tidak berkembang secara optimal.

Relasi kuasa juga terlihat dalam struktur kepemimpinan di tingkat lapangan. Meskipun terdapat mandor perempuan, posisi perempuan dalam struktur pengawasan cenderung tidak berada pada tingkat pengambilan keputusan utama (Azahari et al., 2024). Mandor utama lebih banyak laki-laki, sedangkan perempuan lebih sering berada pada posisi pendamping, asisten mandor, atau krani yang menjalankan fungsi administratif dan membantu pelaksanaan arahan mandor utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam struktur kerja belum selalu berarti adanya representasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan.

Temuan mengenai fasilitas kerja juga memperlihatkan adanya perbedaan posisi dalam struktur tersebut. Mandor memperoleh fasilitas tertentu untuk menunjang pekerjaannya, seperti kendaraan operasional. Namun, mandor perempuan tidak selalu memperoleh posisi dan fasilitas yang setara karena lebih sering ditempatkan sebagai pendamping atau bagian dari struktur di bawah mandor utama. Dengan demikian, akses terhadap fasilitas tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis pekerjaan, tetapi juga mencerminkan posisi seseorang dalam hierarki organisasi.

Relasi kuasa juga dapat terlihat dalam hal-hal yang tampak sederhana dalam kehidupan kerja sehari-hari. Ketika lokasi kerja berada jauh dari titik tertentu, misalnya, pekerja laki-laki cenderung memperoleh prioritas dalam pengantaran, sedangkan pekerja perempuan dijemput kemudian. Praktik semacam ini mungkin tidak secara langsung menghasilkan perbedaan upah, tetapi menunjukkan bagaimana posisi pekerja laki-laki dan perempuan dapat diperlakukan secara berbeda dalam pengorganisasian aktivitas kerja sehari-hari.

Dengan demikian, relasi kuasa dalam penelitian ini bekerja melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, **segregasi pekerjaan**, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan konstruksi mengenai kemampuan perempuan dan laki-laki. Kedua, **kontrol terhadap akses pekerjaan**, ketika mandor memiliki kewenangan menentukan jenis dan lokasi pekerjaan yang dilakukan buruh. Ketiga, **ketimpangan posisi dalam struktur pengambilan keputusan**, ketika perempuan hadir dalam struktur pengawasan tetapi lebih terbatas pada posisi pendamping dan belum menjadi aktor utama dalam menentukan kebijakan kerja.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi perkebunan tidak cukup hanya membuka kesempatan perempuan untuk bekerja. Selama struktur pembagian kerja, persepsi produktivitas, kewenangan pengambilan keputusan, dan akses terhadap pekerjaan bernilai ekonomi lebih tinggi masih dibentuk oleh konstruksi gender, maka keterlibatan perempuan dalam industri belum dapat sepenuhnya dipandang sebagai kesetaraan. Transformasi pekerja perempuan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar, yaitu dari sekadar **akses untuk bekerja** menuju **akses yang setara terhadap jenis pekerjaan, peluang pendapatan, fasilitas, pengembangan kapasitas, dan ruang untuk memengaruhi keputusan**.

Ketimpangan Akses terhadap Pelatihan, Perlindungan Kerja, dan Ruang Suara

Ketimpangan posisi buruh perempuan tidak hanya terlihat dari pembagian pekerjaan, tetapi juga dari terbatasnya akses terhadap pengembangan kapasitas dan perlindungan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, buruh perempuan tidak memperoleh pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi kerja (Rosihan Khalik & Yossi Permata, 2024). Pengetahuan mengenai pekerjaan diperoleh terutama melalui pengalaman dan proses *learning by doing*. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan perempuan yang lebih banyak ditempatkan pada sektor perawatan dan pembibitan, yang dipandang

tidak membutuhkan keterampilan khusus sebagaimana pekerjaan tertentu yang didominasi laki-laki.

Sebaliknya, beberapa pekerjaan yang didominasi laki-laki membutuhkan keterampilan teknis yang lebih spesifik dan proses pembelajaran tertentu. Pemanenan, misalnya, tidak hanya membutuhkan tenaga fisik, tetapi juga teknik dan pengalaman agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Namun, karena perempuan sejak awal tidak ditempatkan pada pekerjaan tersebut, mereka juga tidak memperoleh kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, keterbatasan kompetensi perempuan pada jenis pekerjaan tertentu tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai persoalan kemampuan individual. Kompetensi tersebut juga dibentuk oleh **kesempatan untuk belajar dan memperoleh pengalaman kerja**.

Kondisi tersebut menciptakan sebuah lingkaran reproduksi ketimpangan. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk memasuki pekerjaan tertentu karena dianggap tidak memiliki pengalaman atau produktivitas yang memadai (Kamdar & Patel, 2023). Pada saat yang sama, mereka tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk membangun pengalaman tersebut. Ketika pekerjaan yang dianggap lebih bernilai secara ekonomi memerlukan keterampilan yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman, pembatasan akses terhadap pengalaman secara tidak langsung juga membatasi mobilitas ekonomi perempuan.

Padahal, secara potensial terdapat perempuan yang memiliki kemampuan fisik dan kemauan untuk mengerjakan pekerjaan yang selama ini lebih banyak dilakukan laki-laki. Pekerjaan seperti pembuatan lubang tanam dapat dilakukan oleh perempuan apabila mereka bersedia dan mampu memenuhi target pekerjaan. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat individual dan belum menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memperluas kesempatan perempuan dalam berbagai jenis pekerjaan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesetaraan kesempatan belum menjadi prinsip yang secara aktif diupayakan dalam pengorganisasian tenaga kerja (Macarthur et al., 2021).

Persoalan akses juga ditemukan dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Buruh perempuan tidak memperoleh penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai dari perusahaan. Namun, kondisi ini tidak secara khusus hanya dialami perempuan karena buruh laki-laki juga menghadapi keterbatasan yang serupa. APD lebih banyak dipandang sebagai tanggung jawab individual pekerja, sehingga buruh menyiapkan perlengkapan perlindungan kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akibatnya, kelengkapan dan kesesuaian APD yang digunakan tidak seragam.

Praktik tersebut memperlihatkan adanya pergeseran tanggung jawab perlindungan kerja dari sistem organisasi kepada individu pekerja. Buruh yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memiliki peluang lebih baik untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan, sedangkan pekerja dengan kemampuan terbatas harus menyesuaikan perlindungan dengan sumber daya yang mereka miliki. Dalam kondisi tersebut, pekerja dapat menggunakan perlengkapan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan risiko pekerjaan. Pengalaman terkait kecelakaan kerja ringan yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki konsekuensi nyata terhadap keamanan pekerja.

Meskipun keterbatasan APD dialami oleh buruh laki-laki dan perempuan, posisi perempuan tetap perlu dilihat dalam konteks struktur kerja yang lebih luas. Perempuan lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan tertentu bukan karena memperoleh pilihan yang setara atas seluruh jenis pekerjaan, melainkan melalui pembagian kerja yang telah dibentuk berdasarkan konstruksi gender. Dengan demikian, persoalan keselamatan kerja beririsan dengan persoalan akses: pekerja tidak hanya membutuhkan perlengkapan perlindungan, tetapi juga membutuhkan sistem kerja yang memastikan bahwa perlindungan tersebut tersedia sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang dihadapi.

Keterbatasan akses yang paling mendasar ditemukan pada ruang untuk menyampaikan suara dan keluhan pekerja. Buruh harian lepas dalam penelitian ini tidak memiliki forum khusus yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi atau persoalan ketenagakerjaan secara kolektif (Hyland et al., 2020). Jika terdapat persoalan di lapangan, jalur komunikasi yang tersedia pada dasarnya adalah melalui atasan langsung atau mandor. Hubungan dengan mandor secara umum digambarkan berjalan baik. Mandor tetap mendampingi dan membantu pekerja dalam menyelesaikan target pekerjaan. Namun, hubungan interpersonal yang baik tidak dengan sendirinya menciptakan mekanisme partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan.

Tidak adanya forum keluhan membuat persoalan pekerja perempuan tidak selalu sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Kondisi ini penting dibedakan dari pembungkaman secara langsung. Berdasarkan pengalaman informan, tidak ditemukan praktik bahwa perempuan secara eksplisit dilarang berbicara. Persoalannya justru terletak pada **ketiadaan ruang institusional yang memungkinkan suara tersebut disampaikan**. Perempuan tidak memiliki mekanisme khusus untuk mengajukan tuntutan, membahas kondisi kerja, atau secara kolektif menegosiasikan kebutuhan mereka.

Ketiadaan mekanisme tersebut berkaitan erat dengan status mereka sebagai buruh harian lepas. Hubungan kerja yang tidak memberikan kepastian pekerjaan menciptakan posisi tawar yang relatif lemah. Pekerja memahami bahwa pekerjaan dapat tersedia atau tidak tersedia pada hari tertentu dan bahwa keberlanjutan mereka bekerja sangat bergantung pada kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Dalam konteks seperti ini, muncul kesadaran bahwa posisi mereka berbeda dari pekerja tetap atau pekerja kontrak yang memiliki hubungan kerja lebih formal. Akibatnya, tuntutan untuk memperoleh ruang partisipasi atau menyampaikan keluhan tidak berkembang menjadi praktik kolektif.

Kondisi tersebut menghasilkan bentuk ketimpangan yang lebih struktural. Perempuan tidak harus secara langsung dilarang berbicara untuk mengalami keterbatasan suara. Ketika tidak tersedia forum, mekanisme keluhan, atau ruang negosiasi, maka suara pekerja secara praktis tidak masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, **ketiadaan suara bukan semata-mata akibat pembungkaman, tetapi akibat ketiadaan institusi yang memungkinkan suara tersebut menjadi bagian dari tata kelola kerja.**

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai relasi kuasa dalam pekerjaan perkebunan. Relasi kuasa tidak hanya bekerja melalui instruksi mandor atau pembagian pekerjaan, tetapi juga melalui struktur yang menentukan siapa yang memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan dan siapa yang hanya menjalankan keputusan yang telah dibuat. Bagi buruh perempuan, keterbatasan akses terhadap pelatihan, perlindungan kerja, dan ruang suara secara bersama-sama mempersempit kemungkinan mereka untuk meningkatkan posisi tawar dalam sistem kerja (Möller et al., 2020).

Dengan demikian, transformasi perkebunan yang berorientasi pada pekerja perlu memperhatikan lebih dari sekadar kesempatan untuk masuk ke dalam pasar kerja. Transformasi tersebut perlu menyediakan **akses terhadap pengembangan kompetensi, perlindungan kerja yang layak, dan mekanisme partisipasi.** Tanpa perubahan tersebut, perempuan memang dapat hadir sebagai tenaga kerja dalam industri yang sedang bertransformasi, tetapi belum tentu memiliki kapasitas dan ruang yang memadai untuk menentukan bagaimana transformasi tersebut berlangsung dan manfaat apa yang mereka peroleh darinya.

Transformasi Perkebunan dan Kebutuhan Transformasi Relasi Gender

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi perkebunan kelapa sawit perlu dipahami tidak hanya sebagai perubahan pada sistem produksi, teknologi,

produktivitas, atau tata kelola, tetapi juga sebagai perubahan pada kondisi sosial dan relasi ketenagakerjaan yang menopang keberlangsungan industri. Buruh merupakan bagian langsung dari proses produksi, sehingga perubahan dalam sistem perkebunan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan posisi dan pengalaman pekerjaanya (Damayanti & Rismaningtyas, 2021). Ketika transformasi industri hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas tanpa memperhatikan distribusi manfaat dan kesempatan di antara pekerja, perubahan tersebut berpotensi mempertahankan ketimpangan yang telah ada.

Dalam konteks penelitian ini, perempuan telah menjadi bagian dari tenaga kerja produktif perkebunan, tetapi keterlibatan tersebut belum diikuti transformasi yang setara dalam kehidupan kerja maupun rumah tangga. Perempuan bekerja selama berjam-jam di perkebunan dan pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar pekerjaan domestik. Di tempat kerja, mereka lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan perawatan dan pembibitan, sementara pekerjaan dengan peluang pendapatan lebih besar seperti pemanenan didominasi laki-laki. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan belum secara otomatis mengubah struktur pembagian kerja berbasis gender.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan tidak cukup diukur melalui ada atau tidaknya larangan formal bagi perempuan untuk bekerja pada jenis pekerjaan tertentu. Secara formal, perempuan dapat mengerjakan beberapa pekerjaan yang didominasi laki-laki apabila mampu memenuhi target pekerjaan. Namun, kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan mengembangkan kompetensi pada pekerjaan tersebut belum tersedia secara sistematis. Ketika perempuan lebih sering diarahkan pada pekerjaan tertentu karena dianggap lebih sesuai dengan kemampuan perempuan, pembagian kerja tersebut pada akhirnya membentuk akses yang tidak setara terhadap pengalaman, keterampilan, dan peluang ekonomi.

Hal yang sama terlihat pada akses terhadap pengembangan kapasitas. Buruh perempuan dalam penelitian ini tidak memperoleh pelatihan khusus dan lebih banyak mempelajari pekerjaan melalui pengalaman langsung (Nowak, 2021). Kondisi tersebut mungkin terlihat memadai untuk pekerjaan yang dianggap sederhana, tetapi menjadi persoalan ketika perempuan ingin memperluas jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu, seperti pemanenan, pada akhirnya tetap didominasi laki-laki karena mereka memiliki pengalaman dan kesempatan yang lebih besar untuk menguasainya. Dengan demikian, kesenjangan kompetensi dapat menjadi

konsekuensi dari kesenjangan kesempatan, bukan semata-mata perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan.

Transformasi relasi kerja juga perlu mencakup perlindungan terhadap pekerja. Temuan mengenai APD menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan kerja masih banyak berada pada individu buruh. Kondisi tersebut memang tidak secara khusus membedakan perempuan dan laki-laki, tetapi menunjukkan bahwa sistem perlindungan pekerja harian lepas belum sepenuhnya memberikan jaminan yang memadai. Bagi perempuan, persoalan tersebut beririsan dengan posisi kerja yang telah lebih dahulu dibentuk oleh segregasi gender. Perlindungan kerja yang adil karena itu perlu dipastikan berdasarkan risiko pekerjaan, bukan hanya berdasarkan kemampuan pekerja untuk menyediakan perlengkapannya sendiri.

Aspek lain yang menjadi penting adalah partisipasi pekerja. Buruh perempuan dalam penelitian ini tidak memiliki forum khusus untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan secara kolektif. Ketiadaan forum tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk pelarangan berbicara. Sebaliknya, perempuan berada dalam struktur kerja yang sejak awal tidak menyediakan ruang formal bagi suara mereka untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Status sebagai buruh harian lepas semakin memperlemah posisi tawar karena keberlangsungan pekerjaan tidak memiliki kepastian yang sama dengan hubungan kerja yang lebih formal. Dalam kondisi demikian, pilihan untuk menyampaikan keberatan menjadi terbatas karena pekerja memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan pekerjaan.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan gender dalam perkebunan tidak bekerja melalui satu mekanisme tunggal. Beban ganda di rumah tangga, segregasi pekerjaan di perkebunan, keterbatasan pelatihan, perlindungan kerja yang tidak memadai, dan ketiadaan ruang suara saling berkaitan dalam membentuk posisi perempuan. Beban domestik membatasi waktu dan energi perempuan; pembagian kerja berbasis gender membatasi jenis pekerjaan yang dapat mereka akses; keterbatasan pelatihan membatasi pengembangan kompetensi; sementara posisi kerja yang lemah membatasi kemampuan mereka untuk menegosiasikan kondisi kerja. Ketimpangan tersebut akhirnya membentuk sebuah struktur yang memungkinkan perempuan tetap berkontribusi terhadap produksi tanpa memperoleh posisi yang setara dalam menentukan kondisi produksinya.

Dalam kerangka tersebut, transformasi perkebunan yang berkelanjutan perlu bergerak dari pendekatan yang hanya berorientasi pada perubahan teknis menuju transformasi yang juga memperhatikan relasi sosial dan gender. Transformasi yang inklusif perlu memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk

mengembangkan keterampilan, mengakses pekerjaan dengan peluang ekonomi yang lebih baik, memperoleh perlindungan kerja, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kesenjangan juga perlu dipahami sebagai perubahan pada struktur kesempatan, bukan sekadar pemberian akses formal untuk bekerja.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa **transformasi industri tidak dapat dianggap selesai ketika sistem produksinya telah berubah, sementara kondisi dan posisi pekerjaannya masih berada dalam struktur ketimpangan yang sama**. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, pekerja perempuan bukan sekadar penerima dampak transformasi, tetapi merupakan bagian dari subjek yang memungkinkan transformasi tersebut berlangsung. Karena itu, agenda keberlanjutan perkebunan perlu memasukkan transformasi relasi gender sebagai bagian integral dari perubahan industri. Penguatan keadilan kerja, kesetaraan akses, perlindungan pekerja, dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan bukan sekadar agenda sosial tambahan, melainkan bagian dari ukuran keberhasilan transformasi perkebunan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman buruh perempuan dalam transformasi perkebunan kelapa sawit masih ditandai oleh beban ganda, relasi kuasa yang tidak setara, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya serta kesempatan kerja. Perempuan bekerja selama delapan hingga sembilan jam di perkebunan, tetapi tetap memikul sebagian besar pekerjaan domestik setelah kembali ke rumah. Kondisi tersebut diperkuat oleh pembagian kerja berbasis gender yang menempatkan perempuan terutama pada pekerjaan perawatan dan pembibitan, sementara pekerjaan dengan peluang pendapatan lebih tinggi seperti pemanenan lebih banyak didominasi laki-laki.

Ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap pengembangan kompetensi, perlindungan kerja, dan ruang partisipasi. Buruh perempuan lebih banyak memperoleh keterampilan melalui pengalaman langsung tanpa pelatihan khusus, sementara kesempatan untuk mempelajari pekerjaan yang didominasi laki-laki masih terbatas. Perlindungan kerja juga belum memadai karena penyediaan APD masih banyak menjadi tanggung jawab individual buruh. Pada saat yang sama, tidak tersedianya forum khusus untuk menyampaikan aspirasi membuat suara pekerja perempuan tidak memiliki ruang institusional yang kuat untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Status sebagai buruh harian lepas semakin memperlemah posisi tawar karena keberlangsungan pekerjaan bergantung pada ketersediaan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa transformasi perkebunan kelapa sawit tidak cukup dipahami sebagai perubahan pada aspek teknis, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Transformasi yang berkelanjutan juga perlu menyentuh kondisi dan posisi pekerja sebagai subjek utama proses produksi. Dalam konteks buruh perempuan, transformasi tersebut perlu mencakup penguatan kesetaraan akses terhadap berbagai jenis pekerjaan, pengembangan kompetensi, perlindungan dan keselamatan kerja, kesempatan ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, **transformasi industri sawit yang berkelanjutan perlu berjalan beriringan dengan transformasi relasi gender**, karena perubahan sistem produksi tanpa perubahan pada struktur ketenagakerjaan berisiko mempertahankan ketimpangan yang sama dalam bentuk yang baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh buruh perempuan, mandor, staf perusahaan, tokoh desa, serta keluarga buruh yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menghargai kesediaan seluruh informan dalam memberikan informasi yang menjadi dasar analisis penelitian ini, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- . E., Melia, Y., Irwan, I., Zulfa, Z., Agustini, B., & Putri, R. E. (2026). Gender Relations In Oil Palm Development: Access, Control, Participation, And Benefits Among Farming Households. *Journal Of Social Science And Human Research Studies*, 02(07). <https://doi.org/10.65150/Ep-Jsshhs/V2e7/2026-22>
- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Number March).
- Azahari, D. H., Ratri, S., & Amalia, R. (2024). Mainstreaming Gender Role In Oil Palm Villages In Achieving Sdgs. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 1308(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1308/1/012064>
- Damayanti, D., & Rismaningtyas, F. (2021). Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.

- Eliza, P., Nur, A., & Idria, R. (2023). The Role Of Female Workers In Oil Palm Plantations (A Case Study In Ujong Krueng Village, Tripa Makmur Sub-District, Nagan Raya Regency). *Indonesian Journal Of Islamic History And Culture*, 4(2), 64–78.
- Fatchiya, A., Sulistyawati, A., Tonny, F., Siwi, M., Adisantoso, J., Budiarto, T., & Prasetyo, K. (2022). Karakteristik Sosiodemografis Dan Ketenagakerjaan Perempuan Di Perkebunan Sawit, Provinsi Lampung. *Jurnal Penyuluhan*, 18(01), 155–163. <https://doi.org/10.25015/18202236894>
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Hyland, M., Djankov, S., & Goldberg, P. K. (2020). Gendered Laws And Women In The Workforce. *American Economic Review: Insights*, 2(4), 475–490. <https://doi.org/10.1257/Aeri.20190542>
- Kamdar, M. M., & Patel, V. (2023). Gender-Specific Differences In Parenting: Exploring Attitudes Towards Gender-Responsive Parenting. *Vidya Journal Gujarat University*. <http://vidyajournal.org>
- Macarthur, J., Carrard, N., & Willetts, J. (2021). *Title Exploring Gendered Change: Concepts And Trends In Gender Equality Assessments*.
- Mardiharini, M., Azahari, D. H., Chaidirsyah, R. M., & Obaideen, K. (2021). Palm Oil Industry Towards Sustainable Development Goals (Sdgs) Achievements. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 892(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/892/1/012068>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *An Expand Sourcebook Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Möller, E., Paulmann, J., & Stornig, K. (2020). *Gendering Global Humanitarianism In The Twentieth Century Practice, Politics And The Power Of Representation*. <http://www.palgrave.com/gp/series/14675>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx
- Nowak, J. K. (2021). Gender Inequality In Education. *Human, Technologies And Quality Of Education*, 2021, 424–433. <https://doi.org/10.22364/Htqe.2021.31>
- Pierce Colfer, Markus Ihalainen, & Carol J. (N.D.). *Understanding Gender Dynamics In The Context Of Rural Transformation Processes*.

- Rosihan Khalik, & Yossi Permata. (2024). Women's Double Burden: Environmental Responsibility And Gender Inequality. *Journal Of Sumatera Sociological Indicators*, 3(2), 318–324. <https://doi.org/10.32734/Jssi.V3i2.18718>
- Widyaningsih, T. S., Sanudin, Fauziyah, E., Widiyanto, A., & Juningsih, E. R. (2025). Women's Involvement In Oil Palm Development In Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 1534(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1534/1/012017>